

Implementasi nilai kemanusiaan dan keadilan Pancasila (Sila 2 & 5) dalam mengatasi rasisme guna memperkuat identitas nasional dan kedaulatan bangsa

Febrianto Andi Nugroho

Program studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail : febriantoandi.ng@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila; rasisme;
kemanusiaan; keadilan sosial;
identitas nasional

Keywords:

Pancasila; racism; humanity;
social justice; nasional identity

ABSTRAK

Rasisme masih menjadi tantangan serius di Indonesia karena dapat menunjukkan bahwa Sila ke-2 mendorong penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi ras, sedangkan Sila ke-5 memastikan keadilan dan kesetaraan dalam akses terhadap kesempatan sosial serta perlindungan hukum. Implementasi kedua nilai tersebut tidak hanya mereduksi praktik rasisme, tetapi juga memperkuat karakter bangsa melalui internalisasi nilai

kemanusiaan, persatuan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Dengan demikian, penerapan Pancasila harus diwujudkan dalam kebijakan, pendidikan karakter, serta budaya sosial sebagai fondasi untuk membangun toleransi dan menjaga kedaulatan bangsa. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat kesenjangan sosial, stereotip etnis, dan diskriminasi terselubung yang memperlemah integrasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementatif yang komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk menanamkan nilai kemanusiaan dan keadilan secara berkelanjutan. Pendidikan berbasis Pancasila perlu diperkuat tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi juga afektif dan praksis, sehingga nilai-nilai tersebut benar-benar terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aktualisasi Sila ke-2 dan Sila ke-5 dapat menjadi instrumen efektif dalam mencegah rasisme, memperkuat kohesi sosial, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif, adil, dan beradab sesuai dengan cita-cita Pancasila.

ABSTRACT

Racism remains a significant challenge in Indonesia because it threatens national identity and weakens national unity. Incidents of racial discrimination show that the values of humanity and social justice in Pancasila are not yet fully internalized in society. This article analyzes how the implementation of the values contained in the second principle of Pancasila, "Just and Civilized Humanity," and the fifth principle, "Social Justice for All Indonesian People," can serve as a solution to racism while strengthening national identity and state sovereignty. This study uses a literature review method by examining relevant scientific journals, academic articles, and official documents. The results indicate that the second principle promotes respect for human dignity without racial discrimination, while the fifth principle ensures fairness and equality in social opportunity and legal protection. The implementation of both principles not only reduces racism but also reinforces national identity through the cultivation of humanity, unity, and appreciation of diversity. Therefore, Pancasila must be translated into policies, character education, and social culture to build tolerance and preserve national sovereignty. However, social reality shows that the implementation of these values is not yet fully optimal. Social disparities, ethnic stereotypes, and implicit discrimination persist, weakening national integration. Therefore, a comprehensive implementation strategy is needed through collaboration between the government, educational institutions, and civil society to instill the values of humanity and justice sustainably. Pancasila-based education needs to be strengthened not only at the cognitive level, but also at the affective and practical levels, so that these values are truly internalized in the daily behavior of citizens. This study aims to analyze how the



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

actualization of the Second and Fifth Principles can be an effective instrument in preventing racism, strengthening social cohesion, and realizing an inclusive, just, and civilized Indonesian society in accordance with the ideals of Pancasila.

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah bangsa yang ditakdirkan dengan kekayaan luar biasa berupa keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan, membentuk sebuah masyarakat multikultural yang unik dan kompleks. Namun, realitas keberagaman ini menguji Pancasila sebagai paradigma kehidupan. Di tengah dinamika sosial yang cepat, tantangan nyata muncul, salah satunya dalam bentuk rasisme dan diskriminasi. Menurut (Suryani & Dewi, 2021), "kasus ketidakadilan seperti rasisme dan diskriminasi masih ditemukan di Indonesia", seringkali dipicu oleh perbedaan fisik yang menimbulkan kesenjangan sosial. Ancaman ini secara langsung mengancam sendi-sendi persatuan dan Integrasi Nasional.

Menghadapi konflik laten ini, Pancasila hadir sebagai dasar negara sekaligus benteng ideologis yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Solusi utama dari permasalahan tersebut terletak pada implementasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana termuat dalam Sila Kedua dan Sila Kelima. Implementasi Sila Kedua menuntut pengakuan terhadap martabat manusia yang setara tanpa memandang perbedaan, sedangkan Sila Kelima menekankan pentingnya menghapus ketimpangan dan ketidakadilan struktural yang bersumber dari diskriminasi sosial maupun ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh (Faslah, 2025), Pancasila tidak hanya menjadi dasar konstitusional, tetapi juga panduan moral dan etika bangsa dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, beradab, dan harmonis. Dengan demikian, penerapan kedua sila tersebut dapat berfungsi sebagai strategi kunci dalam memperkuat integrasi sosial dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penguatan Integrasi Nasional melalui implementasi nilai Pancasila ini memiliki implikasi yang jauh lebih besar dari sekadar meredam konflik. Upaya ini merupakan langkah geostrategis yang krusial. Menurut (Faslah, 2024), Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik adalah elemen-elemen yang saling terkait dalam upaya "Membangun Keberlanjutan dan Kedaulatan" bangsa. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi Pancasila di level masyarakat akan mengokohkan Identitas Nasional, dan pada akhirnya menjadi fondasi bagi stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan negara.

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Pancasila adalah keniscayaan strategis. Berdasarkan temuan, rasisme terjadi "karena kurangnya rasa kemanusiaan dan keadilan sosial yang tercantum dalam pancasila yang tidak diamalkan dengan baik". Penulis berpandangan bahwa Pancasila harus dihidupkan sebagai *way of life* yang mengatur etika bertindak, bukan sekadar simbol yang dihafal. Hanya dengan implementasi yang konsisten di tengah masyarakat multikultural, Indonesia dapat membuktikan bahwa semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* benar-benar bersifat abadi, sehingga Kedaulatan Bangsa tetap terjaga di tengah dinamika global.

Pembahasan

Pancasila sebagai Fondasi Identitas Nasional

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi nasional yang lahir dari konsensus para pendiri bangsa, memiliki peran strategis yang jauh melampaui sekadar fungsi konstitusional; ia menjadi refleksi filosofis dari jati diri bangsa yang berakar kuat dalam sejarah dan kebudayaan Indonesia. Peran mendasar ini menjadikan Pancasila sebagai fondasi kokoh bagi eksistensi dan keutuhan bangsa di tengah keragaman sosial, budaya, dan agama. (Unggul et al., 2022) menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai perekat integrasi bangsa Indonesia yang plural, karena tanpa landasan normatif tersebut, persatuan nasional sulit terwujud. Hal senada juga disampaikan oleh (Faslah, 2024) yang menyebut bahwa identitas nasional merupakan fondasi bangsa yang mencerminkan nilai dan sejarah kolektif masyarakat Indonesia. Sejalan dengan itu, (Murdiansyah et al., 2025) menekankan bahwa semangat Pancasila harus terus dihidupkan, terutama di era disrupsi teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), agar nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan moralitas tetap menjadi panduan dalam praktik bisnis maupun pendidikan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya dokumen normatif, tetapi juga benteng etis dan spiritual yang menjaga arah perkembangan bangsa agar tetap selaras dengan nilai luhur kemanusiaan.

Kesadaran kolektif untuk berintegrasi dan bersatu ini diperkuat melalui kerja sinergis dari kelima sila Pancasila, yang secara utuh menjadi paradigma kehidupan bagi masyarakat. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, misalnya, secara eksplisit meletakkan standar moral dan etika yang berlaku universal, yang menuntut setiap warga negara untuk menghargai martabat sesama tanpa memandang latar belakang. Prinsip-prinsip ini bertindak sebagai penyeimbang yang mencegah potensi konflik primordialisme agar tidak menggerus persatuan. Selanjutnya, Sila Persatuan Indonesia secara eksplisit menuntut komitmen setiap elemen bangsa untuk selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau ras. Pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama yang bersifat kemanusiaan dan persatuan, akan secara langsung merusak identitas kolektif ini, membuka celah bagi munculnya konflik, dan mengancam kohesi sosial yang merupakan prasyarat mutlak bagi stabilitas negara.

Rasisme dan Diskriminasi sebagai Ancaman Nyata terhadap Paradigma Kehidupan

Fenomena rasisme dan diskriminasi menjadi indikator kritis terhadap kegagalan masyarakat dalam menjalankan paradigma kehidupan yang bersumber dari Pancasila. Secara umum, (Suryani & Dewi, 2021) mengonfirmasi bahwa "kasus ketidakadilan seperti rasisme dan diskriminasi masih ditemukan di Indonesia" yang dipicu oleh perbedaan fisik dan warna kulit. Fenomena ini bukanlah isu terisolasi, melainkan telah terangkat ke permukaan dan mendapatkan sorotan luas dari media, khususnya melalui *postingan di media baru*. Beberapa kasus menjadi fokus perdebatan publik, seperti pernyataan rasisme yang dialami oleh Natalius Pigai (Afriza et al., 2021), serta insiden rasisme di asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang menguji persatuan bangsa (Rohman, 2024). Kasus-kasus spesifik ini menciptakan hierarki sosial yang tidak adil dan secara fundamental merusak prinsip kesetaraan yang diamanatkan oleh Dasar Negara.

Ancaman rasisme tersebut secara langsung menyerang dua pilar utama dalam paradigma kehidupan Pancasila: Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Rasisme melanggar Sila Kedua karena secara tegas menolak pengakuan universal terhadap martabat manusia yang setara dan beradab. Ketika seseorang didiskriminasi karena rasnya, prinsip etika dan keberadaban secara otomatis tercoreng. Selanjutnya, dampak dari rasisme dan diskriminasi, yang secara sistematis memicu kesenjangan sosial dan ekonomi, secara frontal menentang tujuan Sila Kelima untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, rasisme menunjukkan bahwa "rasa kemanusiaan dan keadilan sosial yang tercantum dalam pancasila... tidak diamalkan dengan baik" (Suryani & Dewi, 2021). Ini membuktikan bahwa tanpa implementasi yang ketat terhadap kedua sila ini, Integrasi Nasional akan tetap rapuh dan dasar negara akan tergerus oleh konflik internal.

Integrasi Nasional dari Stabilitas Sosial hingga Pilar Geostrategi

Integrasi Nasional, yang berfungsi sebagai penjabaran Sila Ketiga, adalah fondasi dasar bagi Ketahanan Nasional Indonesia. Stabilitas internal yang dijamin oleh persatuan bangsa merupakan syarat mutlak agar Indonesia dapat memproyeksikan kekuatan dan pengaruhnya di kancah global. (Faslah, 2024) menegaskan bahwa "Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik adalah elemen-elemen yang saling terkait dalam upaya 'Membangun Keberlanjutan dan Kedaulatan' bangsa." Dalam konteks ini, Integrasi Nasional merupakan cerminan dari keberhasilan politik domestik. Ketika masyarakat mampu mengatasi konflik internal (seperti rasisme) melalui nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia memiliki modal sosial dan politik yang kuat untuk menghadapi tekanan eksternal, yang akhirnya menjamin tercapainya kedaulatan di tingkat internasional.

Keberhasilan Integrasi Nasional yang bersumber dari Pancasila akan menghasilkan Ketahanan Nasional yang kokoh. Menurut (Naja, 2023), Geostrategi Indonesia dirancang untuk "memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan tujuan negara melalui pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan." Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk upaya memecah belah bangsa, termasuk rasisme, adalah ancaman terhadap Geostrategi Indonesia karena melemahkan Ketahanan Nasional dari dalam. Sebuah bangsa yang sibuk dengan konflik rasial internal akan kehilangan fokus untuk bersaing di tingkat global, membuat kemampuan diplomasi menjadi tidak efektif, serta rentan terhadap intervensi asing. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara yang menghasilkan Integrasi Nasional adalah bentuk pertahanan tidak langsung paling efektif untuk menjaga Kedaulatan Bangsa dari segala ancaman.

Aktualisasi Sila Kemanusiaan (2) dan Keadilan (5) sebagai Strategi Antirasisme

Implementasi Sila Kedua harus diartikan sebagai komitmen bangsa terhadap penegakan martabat dan hak asasi setiap manusia. (Qalbi et al., 2024) menegaskan bahwa Pancasila adalah "pilar etika dan keadilan" yang memberikan landasan moral bagi pengakuan dan perlindungan HAM. Dengan memosisikan diri sebagai penegak HAM, upaya antirasisme menjadi kewajiban etis, bukan sekadar pilihan. Implementasi praktisnya menuntut setiap individu untuk menumbuhkan sikap empati, pengakuan setara, dan membangun dialog antar budaya. (Rohman, 2024) menambahkan bahwa

dibutuhkan penerapan nilai-nilai Pancasila secara lebih konsisten dan mendalam untuk mengatasi rasisme yang dipicu perbedaan fisik.

Kesimpulan dan Saran

Pancasila, sebagai Dasar Negara dan Paradigma Kehidupan bangsa yang dijiwai oleh nilai-nilai Sila Kemanusiaan (2) dan Sila Keadilan Sosial (5), merupakan fondasi etika dan moral yang esensial untuk menjamin Identitas Nasional dan Kedaulatan Bangsa. Analisis menunjukkan bahwa isu rasisme dan diskriminasi adalah ancaman serius terhadap paradigma kehidupan Pancasila, yang secara fundamental merusak prinsip kesetaraan dan persatuan bangsa. Lebih jauh, kegagalan dalam mengendalikan isu sosial ini memiliki konsekuensi geostrategis yang signifikan, sebab rasisme akan merusak Integrasi Nasional, yang pada gilirannya melemahkan Ketahanan Nasional dan mengancam Kedaulatan Bangsa. Oleh karena itu, upaya mengatasi rasisme harus dipandang sebagai penegakan kembali Dasar Negara. Aktualisasi Sila Kedua harus diwujudkan melalui penegakan etika kemanusiaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sementara Sila Kelima harus diimplementasikan melalui strategi struktural yang konsisten, terutama melalui Pendidikan Multikultural untuk menanamkan paradigma kehidupan antirasisme sejak dini.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan tiga langkah strategis. Pertama, Penguatan Kurikulum Pendidikan harus diupayakan secara lebih mendalam dan merata, dengan fokus pada Pendidikan Multikultural Berbasis P5 untuk membentuk paradigma kehidupan yang inklusif dan antirasisme di tingkat individu. Kedua, Penegakan Hukum yang Konsisten mutlak diperlukan, di mana lembaga penegak hukum harus memastikan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis diterapkan secara tegas untuk menegaskan bahwa rasisme adalah kejahatan serius terhadap Dasar Negara. Terakhir, diperlukan Peningkatan Peran Media Baru, di mana institusi sosial dan agama bersinergi dengan platform digital untuk menciptakan narasi proaktif yang mempromosikan nilai-nilai Sila Kedua dan Kelima. Dengan melaksanakan rekomendasi ini, implementasi nilai Kemanusiaan dan Keadilan Pancasila akan menjadi strategi pertahanan bangsa yang paling efektif untuk memperkuat persatuan dan menjamin kedaulatan negara.

Daftar Pustaka

- Afriza, E. S. D., Suryawati, I., Junaidi, Ronda, A. M., & Diana, R. (2021). *Analisis Kasus Rasisme Papua Natalius Pigai Dalam Perspektif Teori Spiral Keheningan*. 12(1). <https://doi.org/10.36080/comm.v12i1.1328>
- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872>
- Faslah, R. (2025). *Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa*. UIN Malang Press, Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Murdiansyah, I., Slamet, S., Hamdani, H., & As'ady, M. (2025). Pentingnya spirit Pancasila benteng penahan gempuran Artificial Intelligence dalam bisnis dan pendidikan

- akuntansi. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 10(01), 36–42. <http://repository.uin-malang.ac.id/23881/>
- Naja, M. S. (2023). *Geostrategi indonesia dalam menghadapi dinamika global: Ketahanan nasional dan implementasi politik luar negeri*.
- Qalbi, N. L., Adhiyya, S. F., Hafidh, E. N., & Tajalla, N. (2024). Pancasila dan hak asasi manusia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(12), 78–85.
- Rohman, A. (2024). Implementasi nilai pancasila: Menghadapi problematika rasisme dan diskriminasi. 2(7), 147–156.
- Suryani, Z., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi pancasila dalam menghadapi masalah rasisme dan diskriminasi. 5(1), 192–200. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1448>
- Unggul, A. R. P., Ajati, D. T., Saputra, R. W., & FITRIONO, R. A. (2022). Pancasila sebagai dasar negara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(04), 25–31.